

ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA METRO

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan menenuhi Syarat-Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Biologi**

Oleh

Muhammad Taufiqul Amri

NPM : 1511060107

Jurusan : Pendidikan Biologi



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1441 H / 2020 M

ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA METRO

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan menenuhi Syarat-Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

Oleh

MUHAMMAD TAUFIQUL AMRI

NPM : 1511060107

Jurusan : Pendidikan Biologi

Pembimbing I : Dr. H. Subandi, MM

Pembimbing II : Dr. Eko Kuswanto, M.Si

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1441 H / 2020 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan perkotaan di Indonesia sebagai mana terjadi di Kota-Kota lain dunia, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi (manusia) akibat urbanisasi, terutama para pendatang yang akhirnya menetap. Sejak Tahun 1970-an, khususnya pada dekade pertama, sampai Tahun 1980-an, 35% dari pertumbuhan total di semua sektor pembangunan lingkungan perkotaan adalah akibat gelombang urbanisasi yang dipacu oleh pembangunan fisik sarana dan prasarana Kota yang merupakan daya tarik sekaligus daya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang kehidupan lebih baik, termasuk sarana pendidikan dari daerah asalnya.

Laju pembangunan itu pula yang menyebabkan perkembangan Kota seolah tanpa arah (*urban sprawl*). Akibat lanjut pembangunan yang tak terkontrol ini, telah membentuk “kantong-kantong” permukiman yang selalu nampak kumuh, padat, dan miskin di seluruh bagian Kota. Seturut bertambahnya jumlah penduduk di Kota-Kota dan perkotaan, beban Kota semakin berat. Jumlah penduduk perkotaan semakin tinggi, di Indonesia Tahun 2015 diperkirakan 60% penduduk berada di perkotaan. Sementara disisi lain, kebutuhan akan lahan untuk permukiman menyebabkan tingginya alih-guna lahan di perkotaan dan munculnya permukiman-permukiman kumuh. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Penduduk perkotaan makin sering

mengalami bencana banjir, polusi udara, kebisingan dan kerawanan sosial yang menyebabkan menurunnya produktivitas masyarakat. Dan isu yang cukup *krusials* dalam persoalan Kota dan perkotaan adalah semakin berkurangnya luasan RTH. Kuantitas dan kualitas ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan makin menurun dari Tahun keTahun. Saat ini luas RTH perkotaan rata-rata hanya 10% dan rasio per kapita hanya 0.45-0.55 m²/kapita.¹

Kota Metro secara geografis terletak pada 105,170-105,190 bujur Timur dan 5,60-5,80 lintang Selatan, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (IbuKota Provinsi Lampung). Wilayah Kota Metro relatif datar dengan ketinggian antara 30-60 m diatas permukaan air laut. Beriklim hujan humid tropis .suhu udara berkisar antara 260-280, kelembaban udara rata-rata 80-88 % dan curah hujan per-Tahun antara 2,264 mm – 2,868 mm. bulan hujan berkisar antara September sampai Mei.

Kota Metro memiliki Luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha, dengan jumlah penduduk 150.950 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah Kecamatan dan 22 Kelurahan dengan batas wilayah Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, kabupaten Lampung Timur dan sebelah Barat dengan Kecamatan trimurjo, kabupaten Lampung tengah.

¹ Aprimeno Sabdey, Soedarsono, and M. Faiun Niam, 'Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Studi Kasus : Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau', *Inovasi Dalam Pengembangan*, 2017, 135–50.

Pola penggunaan lahan di kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu lahan terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lainnya. Kawasan tidak terbangun didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis seluas 2.968,15 hektar atau 43,38% dari luas wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan, tegalan dan sawah non irigasi.

Latar belakang suku penduduk di Kota Metro beraneka ragam, yang sebagian berasal dari Jawa, Sumatera Barat, Lampung, dan Tionghoa. Seni budaya juga berkembang sesuai daerah asalnya. Keanekaragaman budaya ini menjadikan keunggulan tersendiri bagi Kota Metro untuk menarik wisatawan. Guna mempromosikan objek wisata dan budaya daerah, maka pada peringatan Hari Jadi Kota Metro setiap tanggal 9 Juni, Pemerintah Kota Metro menggelar Festival Kota Metro yang digabungkan dengan Metro Expo.

Kota Metro memiliki fasilitas yang memadai, berbagai prestasi dibidang pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, penduduknya yang ramah, serta harga-harga kebutuhan pokok relatif murah dan mudah diperoleh merupakan daya tarik tersendiri bagi warga yang ingin menimba ilmu. Kawasan pendidikan Kota Metro berpusat di daerah kampus, serta tersebar di setiap penjuru wilayah. Saat ini terdapat 12 Perguruan Tinggi dan 183 buah sekolah mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Menengah dan Kejuruan serta berbagai sarana pendidikan non formal lainnya. Kota Metro memiliki Gedung Perpustakaan yang cukup representatif, letaknya yang strategis memudahkan bagi pelajar dan masyarakat

umum untuk datang dan membaca di perpustakaan ini. Masyarakat juga mengembangkan perpustakaan Kelurahan yang dikenal dengan sebutan “Rumah Pintar” yang memudahkan warga menimba ilmu melalui berbagai buku-buku yang tersedia .

Permasalahan tata ruang Indonesia masih diwarnai oleh suatu kondisi, dimana kita belum mampu melakukan suatu kebijakan, dan prosedur penataan ruang yang ada belum mampu mengimbangi perkembangan pembangunan yang demikian pesatnya, khususnya perkembangan pembangunan yang terjadi di daerah perkotaan .

Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, dengan terdistribusinya kewenangan pemerintah Pusat kepada daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan. Otonomi daerah banyak diberikan dalam bentuk kewenangan terhadap potensi yang dimiliki oleh daerah. Dampak dari perkembangan ini adalah keinginan setiap daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, termasuk lahan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kecendrungan ini dari sudut pandang ekonomi berpeluang untuk menggerakkan kekuatan produksi dan pasar daerah, akan tetapi jika ditinjau dari aspek hukum tata ruang terdapat potensi timbulnya konflik antar daerah, terutama pada pemanfaatan lahan.²

Pembangunan di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah perkotaan tertentu, harus memiliki suatu perencanaan atau suatu konsep tata ruang atau yang dulu sering disebut dengan master plan, dimana berlakunya undang-undang

² M.Hum Suria Ningsih, SH, M.Hum Zaidar, SH, and Muhammad Yogi Angga Utama Siregar, ‘Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Pemerintah Kota Medan)’, *Cell*, 3.4 (2014), 1–15

tentang penataan ruang, banyak pemerintah daerah yang merasakan kesulitan dalam memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau publik seluas 20% dari luas kawasan perkotaan. Kekurangan proporsi ruang terbuka hijau yang ada di Kota-Kota di Indonesia disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata dan kian mempersempit ruang terbuka hijau yang ada.³

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, Kelurahan /Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya. Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ada juga yang berupa area terbuka terbangun, misalnya taman-taman disekitar rumah, area yang dibuat khusus untuk keperluan tertentu seperti parkir, balai pertemuan dan sebagainya. Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi social dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga system ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsure estetis lingkungan. RTH dapat dimaksudkan untuk menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan, seperti peningkatan temperature udara, penurunan tingkat peresapan air dan kelembaban udara, polusi dan lain sebagainya. Karena tingkat kepentingannya yang kompleks, pemerintah mengatur pemanfaatan ruang terbuka dalam skala yang berjenjang, baik dalam tingkat RT, RW, desa, Kecamatan dan bahkan sampai tingkat nasional. Dalam setiap tingkat

³Jeluddindaud, prinsip pembangunan wilayah (regional planning) sebagai suatu pedekatan dalam menyusun rencana tatar uang, makalah seminar penataan ruang, Tahun 1996

kewilayahan, diatur kuantitas dan kualitas ideal guna lahan termasuk prosentase sejumlah ruang terbuka untuk mendukung kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan dan penghuninya.⁴

Selain dari penjelasan di atas, RTH juga dapat berfungsi secara estetika diantaranya meningkatkan kenyamanan jika memang di jaga dengan baik dan dapat memperindah lingkungan Kota, serta menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga Kota untuk peduli dengan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Surah Al A'raf Ayat 56-58

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

Artinya:

“(56) Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al A'raf 56)⁵

Kurangnya proporsi ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan disebabkan oleh lebih tingginya permintaan lahan untuk kegiatan perkotaan. Sementara banyak pihak menganggap ruang terbuka hijau memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah sehingga termarginalkan. Banyak pemerintah daerah yang merasakan kesulitan dalam memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau public seluas 20% dari luas kawasan perkotaan. Kekurangan proporsi ruang terbuka hijau

⁴ Budi Santoso, Retna Hidayah, and Sumardjito, 'Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman', *Inersia - Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 8.1 (2012), 1–14

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Ekamedia Arkanleema, 2009)

yang ada di Kota-Kota di Indonesia disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata dan kian mempersempit ruang terbuka hijau.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian mengenai berapa luasan dan sebaran ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Metro serta berapakah luasan lahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau, maka perlu dilakukan suatu penelitian tentang kajian kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan pendekatan luas wilayah yang tersedia. Sehingga peneliti mengambil judul **“ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA METRO”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai jenis-jenis ruang terbuka hijau yang ada di Kota Metro.
2. Kurangnya proporsi ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan disebabkan oleh lebih tingginya permintaan lahan untuk kegiatan perkotaan.
3. Kurangnya data sebaran ruang terbuka hijau (RTH) yang terdapat di Kota Metro.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini agar tidak terlalu luas dan menyimpang dari tujuan awal diadakannya penelitian maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut;

1. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di 5 Kecamatan di Kota Metro yakni Metro Pusat, Metro Utara, Metro Selatan, Metro Barat, dan Metro Timur
2. Penelitian ini mencakup jenis-jenis , luasan dan sebarang Ruang Terbuka hijau di Kota Metro.

D. Rumusan Masalah

Pada masalah yang sudah di uraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah yakni;

1. Apa saja jenis-jenis ruang terbuka hijau yang tersedia di masing-masing Kecamatan di Kota Metro.
2. Berapa luasan ruang terbuka hijau yang terdapat di masing-masing Kecamatan Kota Metro.
3. Berapa sebaran ruang terbuka hijau (RTH) yang terdapat di Kota Metro .

E. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yakni;

1. Mengetahui jenis-jenis ruang terbuka hijau yang tersedia di masing-masing Kecamatan di Kota Metro
2. Mengetahui luasan masing-masing ruang terbuka hijau yang tersedia di masing-masing Kecamatan di Kota Metro.
3. Mengetahui berapa sebaran ruang terbuka hijau (RTH) yang terdapat di Kota Metro .

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diuraikan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori yang ada sehubungan dengan masalah yang telah diteliti
- b. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat Kota Metro dalam memahami pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan
- b. Memberikan informasi kepada dinas atau instansi terkait di Kota Metro sehingga dalam pengembangan perencanaan penyediaan ruang terbuka hijau agar dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah di Kota Metro
- c. Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat perkotaan yang manusiawi dan bermartabat.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini antara lain:

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah ruang terbuka hijau di Kecamatan Metro Utara, Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung.
2. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Kota Metro, meliputi 5 Kecamatan.
3. Ruang lingkup waktu penelitian yaitu Tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kota

Kota dan perkotaan merupakan Pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam suatu peraturan perundangan sehingga dapat memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Mengingat perkembangan suatu Kota selalu diikuti oleh proses urbanisasi, dengan demikian Kota dan perkotaan selalu bersifat dinamis baik struktur, bentuk, dan wajah serta penampilan Kota. Perkembangan Kota juga merupakan hasil dari penyelesaian konflik perkotaan yang terjadi, dan mencerminkan perkembangan peradaban warga Kota maupun pengelolanya. Salah satu konflik yang akhir-akhir ini meningkat di wilayah perkotaan adalah masalah lingkungan hidup, sehingga diperlukan pengintegrasian perencanaan lingkungan hidup ke dalam perencanaan tata ruang perkotaan. Tata ruang dan lingkungan hidup mengandung arti yang sangat luas karena Kota yang baik merupakan kesatuan ruang yang direncanakan berdasarkan kebutuhan komponen penyusunan ruangnya, sehingga dapat menciptakan suasana kenyamanan dan kesehatan bagi warganya.⁶

Kota Metro bermula dari dibangunnya sebuah Induk Desa Baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan Induk Desa Baru untuk mengumpulkan sebagian dari koloni yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung koloni-koloni yang akan didatangkan selanjutnya. Kedatangan kolonis pertama di

⁶ Samsudi, 'Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta', *Journal of Rural Development*, 1.1 (2010), 11–19.

daerah Metro yang saat ini masih bernama Trimurjo adalah pada hari Sabtu, 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada hari Sabtu, 4 April 1936 bagi para kolonis dibagikan tanah pekarangan yang sebelumnya memang telah diatur. Setelah kedatangan orang-orang yang pertama, perkembangan daerah ini berkembang pesat, semakin terbuka dan semakin bertambah, kegiatan-kegiatan mulai tumbuh dan berkembang. Pada hari Selasa, 9 Juni 1937 nama Desa Trimurjo diganti dengan nama Metro, dan karena perkembangan penduduk yang pesat, maka Metro menjadi tempat kedudukan Asisten Wedana dan sebagai Pusat pemerintahan Onder District Metro.

Asisten Wedana (Camat) yang pertama adalah Raden Mas Sudarto. Nama Desa Trimurjo menjadi Desa Metro, karena berdasarkan pada letak-letak wilayah yang berdiri ditengah-tengah antara Adipuro (Trimurjo) dengan Rancangpurwo (Pekalongan). Menemukan nama Metro, seorang kolonis kata berasal dari kata “Mitro” yang berarti keluarga, persaudaraan atau kumpulan kawan-kawan. Adapula yang mengatakan Metro berasal dari “Meterm” (Bahasa Belanda) yang berarti “Pusat atau centrum” atau Pusat, yang maksudnya merupakan Pusat / Pusat kegiatan karena memang sedang ditengah-tengah. Kolonis yang lain mengatakan Metro memiliki artian ganda, yaitu saudara / persaudaraan dan tempat yang terletak ditengah-tengah antara Rancang purwo (Pekalongan) dan Adipuro (Trimurjo).

Pemerintah Kolonial Belanda mempersiapkan penataan daerah kolonisasi ini dengan baik, yaitu dengan mengadakan pengaturan untuk daerah pemukiman,

daerah pertanian, tempat-tempat perdagangan, jaringan jalan raya, tempat-tempat untuk pembangunan berbagai fasilitas sosial, jaringan saluran irigasi, untuk perkantoran, lapangan, taman-taman dan bahkan “rute” pembuangan air hujan. Dengan kata lain, Pemerintah Kolonial Belanda telah menggariskan “land use planning” daerah.

Seiring dengan perjalanan waktu, Kota Metro sebagai Pusat pemerintahan Kecamatan Kota Metro dan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1986 berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1986. Keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai Daerah Otonom bermula pada Tahun 1968, kemudian berlanjut pada Tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II Propinsi Lampung merencanakan untuk memekarkan 4 Dati II (1 Kotamadya dan 3 kabupaten) menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya terpenuhi dengan diresmikannya Kotamadya Dati II Metro (sekarang dengan nomenklatur baru disebut Kota Metro) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan, Lamti. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2002, ditetapkan tanggal 09 Juni 1937 sebagai hari jadi Kota Metro.⁷

Kota Metro berada di jalur yang strategis karena berada pada jalur lintas Sumatera dengan empat persimpangan jalur kabupaten, yaitu 1) Kota Metro –

⁷ A.charito gemantara, <https://gemantara.com/sejarah-Kota-Metro-Lampung/>, (diakses pada 18 september 2019 pukul 03.00)

Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, 2) Kota Metro – Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, 3) Kota Metro – Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan 4) Kota Metro – Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Kota Metro selain sebagai Kota persimpangan empat jalur juga merupakan salah satu Kota pendidikan unggulan di Provinsi Lampung.

Kondisi tersebut menjadikan Kota Metro sebagai Kota transit dan Kota fasilitas pendidikan. Kota Metro sebagai Kota transit akan mengalami peningkatan mobilitas atau migrasi penduduk dari dan keluar Kota Metro dan Kota Metro sebagai Kota pendidikan akan membutuhkan pembangunan fasilitas dan utilitas untuk menunjang kegiatan dan proses pembelajaran. Konsekuensi lain kondisi tersebut akan meningkatkan jumlah penduduk jumlah penduduk, sesuai data Kota Metro dalam Angka BPS Tahun 2016 jumlah penduduk Kota Metro berjumlah 149.361 jiwa pada Tahun 2013 meningkat kisaran 9.000 jiwa dalam kurun dua Tahun pada Tahun 2015 meningkat menjadi 158.415 jiwa. Pembangunan fisik dengan membangun infrastruktur dan utilitas Kota sebagai salah satu dampak meningkatnya jumlah penduduk dengan beragam pemenuhan kebutuhan. Perkembangan fisik Kota yang menonjol akan mengurangi kenampakan visualisasi alami Kota. Peningkatan jumlah penduduk sejalan dengan meningkatnya kebutuhan Oksigen dan berkurangnya lahan terbuka hijau akan menurunkan pasokan ketersediaan Oksigen.⁸

⁸ Merligon, 'Inventarisasi Dan Arahan Prioritas Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Metro, Provinsi Lampung MERLIGON', 2017.

B. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau Kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (urban). Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan berkepadatan tinggi, keseimbangan tersebut mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, mengembalikannya ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem dinilai penting. Pengetahuan dapat di artikan sebagai hasil dari kontruksi kognitif melalui kegiatan individu dengan membuat struktur kategori, konsep, dan skema yang di perlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut.⁹

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, Kelurahan /Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya. Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau. Ada juga yang berupa area terbuka terbangun, misalnya taman-taman disekitar rumah.

⁹ Chairul Anwar. "Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer Formula Dan Penerapan Dalam Pembelajaran", Yogyakarta: Ireisod. 2017. Hal 311

Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi social dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga system ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan. RTH dapat menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresapan air dan kelembaban udara, polusi dan lain sebagainya. Karena tingkat kepentingannya yang kompleks, pemerintah mengatur pemanfaatan ruang terbuka dalam skala yang berjenjang, baik dalam tingkat RT, RW, desa, Kecamatan dan bahkan sampai tingkat nasional. Dalam setiap tingkat kewilayahan, diatur kuantitas dan kualitas ideal guna lahan termasuk prosentase jumlah ruang terbuka untuk mendukung kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan dan penghuninya.¹⁰

Ruang terbuka hijau Kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (urban). Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan berkepadatan tinggi, keseimbangan tersebut mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, mengembalikannya ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem dinilai penting.

Ruang terbuka hijau Kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik secara ekologis maupun social dan psikologis.

¹⁰ Santoso, Hidayah, and Sumardjito., Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman, Inersia - Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur, 2012

Namun demikian, saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak dari tingginyakepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat. Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian guna lahan yang berfungsi membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan. Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area terbangun. Proporsi lahan yang tertutup perkerasan semakin besar dan secara ekologis mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan perkotaan. Di antara gangguan tersebut adalah meningkatnya temperatur, frekuensi banjir dan polusi udara, serta berkurangnya keragaman hayati. Selain itu, dari aspek sosial, warga semakin kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi.¹¹

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur, dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun buatan. Sedangkan menurut Hakim, RTH adalah bagian dari ruang terbuka yang diisi oleh tanaman, tumbuhan dan vegetasi guna mendapatkan manfaat keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan suatu kawasan.

¹¹ Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal, and Agus R. Soeriaatmadja, 'Kebutuhan Terbuka Kota, Kawasan Padat, Studi Kasus Wilayah Tegallega, Bandung', *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 281.1 (2012), 27–38.

Merujuk pada kriteria ideal penyediaan RTH yang diatur dalam Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, disebutkan bahwa proporsi luasan RTH suatu perkotaan yakni sebesar 30% dari luas wilayahnya. Proporsi tersebut terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH Privat. Sedangkan pemanfaatan RTH dapat ditinjau berdasarkan fungsinya yakni fungsi instrinsik (fungsi ekologis) dan fungsi ekstrinsik yang meliputi fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika.¹²

C. Lingkungan Sekitar

Ruang Terbuka Hijau sama erat kaitanya dengan alam sekitar, dengan begitu sebelum mengetahui apa itu Ruang Terbuka Hijau kita harus mengetahui apa yang di maksud dengan alam sekitar. Alam sekitar adalah segala sesuatu di luar diri manusia yang mempunyai arti bagi manusia. Dengan kata lain, segala sesuatu di luar diri manusia sangat banyak mencakup di dalamnya baik itu hewan, tumbuhan, maupun benda-benda mati yang ada di sekitar manusia seperti air, angin, batu dan lain sebagainya, juga termasuk di dalamnya kulkas, kompor pena handphone dan sejenisnya.

Alam sekitar itu sendiri dapat di bagi menjadi 3 bagian yaitu alam kodrat, benda-benda buatan manusia, dan manusia itu sendiri. Menurut Chairul Anwar hubungan manusia seutuhnya dengan alamnya mengandung beberapa aspek, antara lain bahwa manusia tidak lepas dari interaksinya bersama sesama manusia juga dengan hewan, tumbuhan, lingkungan atau alam. Aspek-aspek tersebut

¹² Wida Oktavia Suciyan, 'Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Kampus Di Politeknik Negeri Bandung', *Jurnal Planologi*, 15.1 (2018), 17

sangat berarti dengan manusia, karena manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan di sekitar lingkungan hidupnya.¹³

D. Dampak

Dampak negatif dari sub-optimalisasi ruang terbuka hijau berupa menurunnya kenyamanan Kota, penurunan kapasitas dan daya dukung wilayah yang dicirikan dengan meningkatnya pencemaran, menurunnya kualitas air tanah, meningkatkan suhu Kota, serta menurunnya kualitas oksigen atau udara bersih di perkotaan. Perubahan fungsi ini sebagai akibat RTH Kota tidak memenuhi persyaratan jumlah dan kualitasnya, yaitu RTH tidak tersedia, tidak mencukupi, dan tidak fungsional. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah perkotaan maka diperlukan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan kawasan hijau Kota.

Dampak negatif dari tidak optimalnya RTH dimana RTH Kota tersebut tidak memenuhi persyaratan jumlah dan kualitas (RTH tidak tersedia, RTH tidak fungsional, fragmentasi lahan yang menurunkan kapasitas lahan dan selanjutnya menurunkan kapasitas lingkungan, alih guna dan fungsi lahan) terjadi terutama dalam bentuk/kejadian:

1. Menurunkan kenyamanan Kota : penurunan kapasitas dan daya dukung wilayah (pencemaran meningkat, ketersediaan air tanah menurun, suhu Kota meningkat).
2. Menurunkan keamanan Kota.

¹³ Anwar Chairul. "Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis". Yogyakarta: SUKA-Press, 2014. Hal 36-37

3. Menurunkan keindahan alami Kota dan artifak alami sejarah yang bernilai kultural tinggi.
4. Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (menurunnya kesehatan masyarakat secara fisik dan psikis) , misalnya karena :
 - a) Tidak terserap dan terjerapnya partikel timbal.
 - b) Tidak terserap dan terjerapnya debu semen.
 - c) Tidak ternetralisirnya bahaya hujan asam.
 - d) Tidak terserapnya karbon-monoksida (CO).
 - e) Tidak terserapnya karbon-dioksida (CO₂).
 - f) Tidak teredamnya kebisingan.
 - g) Tidak tertahannya hembusan angin.
 - h) Tidak terserap dan tertapisnya bau.

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.¹⁴

Pembangunan ekonomi atau pengembangan kawasan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah yang ada di Kota Banda Aceh terjadi pada suatu ruang. Ketidaktepatan rencana dan ketidaktertiban pemanfaatan ruang dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga lingkungan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Kondisi

¹⁴ Achmad Mukafi, 'Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Kudus', 2013.

demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem, yang dapat berupa terjadinya peningkatan suhu udara dan pencemaran udara.

E. Tujuan Keharusan Keberadaan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan perkotaan adalah dengan pengadaan dan pengembangan RTH yang tepat dan sesuai fungsinya. Sebagai salah satu pemasok utama ketersediaan udara bersih di perkotaan adalah vegetasi dalam RTH sebagai paru-paru Kota yang merupakan produsen oksigen (O_2), penyerap karbondioksida (CO_2) dan gas polutan lain, serta sebagai daerah resapan air, yang belum tergantikan fungsinya. Fungsi RTH paru-paru Kota, yang paling utama merupakan aspek berlangsungnya fungsi daur ulang antara gas karbondioksida (CO_2) dan oksigen (O_2) hasil fotosintesis khususnya pada dedaunan. Proses ini sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan, karena dapat menyerap gas yang bila konsentrasinya meningkat akan berbahaya baginya, dan proses ini menghasilkan gas oksigen yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan di perkotaan.

Untuk menciptakan keseimbangan ekologi di wilayah perkotaan maka perlu penetapan standar berapa luas RTH yang harus disediakan di suatu Kota. Pendekatan pembangunan RTH yang digunakan dalam kajian ini mengacu pada luas wilayah Kota dan kebutuhan oksigen. Penetapan standar luas RTH berdasarkan luas wilayah dapat ditentukan dengan mempedomani Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan standar luas RTH

berdasarkan pendekatan kebutuhan oksigen dapat ditentukan dengan menggunakan Metoda Gerakis.¹⁵

Perkembangan pembangunan Kota saat ini menunjukkan kecenderungan terjadinya aktivitas pembangunan yang tidak seimbang. Pembangunan yang terjadi saat ini lebih berorientasi pada pemenuhan ruang-ruang Kota dengan fasilitas maupun sarana prasarana berupa kawasan terbangun yang berisi bangunan fisik yang tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang terbuka yang memadai khususnya ruang terbuka hijau. Aktivitas pembangunan yang tidak seimbang ini dapat berdampak negatif bagi kondisi lingkungan hal ini dikarenakan pada kondisi tertentu lingkungan tidak dapat mendukung maupun mengakomodasi aktivitas perkotaan secara berlebihan sehingga mengakibatkan kualitas lingkungan menjadi terganggu. Wilayah perkotaan dengan dinamika perkembangannya hendaknya tetap dapat menjaga dan menjamin terpeliharanya kelestarian sumberdaya dan kualitas lingkungan.

Bentuk atau model penataan Kota yang dapat menciptakan kualitas lingkungan yang optimal adalah melalui penataan yang tidak hanya fokus pada pengembangan kawasan terbangun untuk fungsi-fungsi sosial maupun ekonomi tetapi juga mempertimbangkan keberadaan atau ketersediaan ruang terbuka hijau. Salah satu upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari bahaya lingkungan terhadap pembangunan fisik wilayah perkotaan adalah melalui perencanaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau memiliki beberapa manfaat penting bagi suatu Kota utamanya dalam menjamin terpeliharanya kualitas lingkungan Kota

¹⁵ Saiful Bahri and Syamaun A Ali, 'Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh', *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, 1.1 (2012), 10–22.

disamping manfaat lain berupa manfaat sosial, ekonomi maupun perannya dalam meningkatkan kualitas visual dan estetika Kota.¹⁶

Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian guna lahan yang berfungsi membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan. Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area terbangun. Proporsi lahan yang tertutup perkerasan semakin besar dan secara ekologis mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan perkotaan. Di antara gangguan tersebut adalah meningkatnya temperatur, frekuensi banjir dan polusi udara, serta berkurangnya keragaman hayati. Selain itu, dari aspek sosial, warga semakin kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi.

Menghadapi permasalahan tersebut, wacana mengenai konsep pembangunan Kota yang mulai memberikan perhatian pada factor ekologi, selain pada faktor ekonomi dan sosial, semakin berkembang. Salah satunya adalah konsep “eco-city (ecological cities)”. Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan ini merupakan bentuk representasi strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh karakter kawasan perkotaan. Berdasarkan konsep ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan mengembalikan ruang terbuka hijau ke dalam lingkungan perkotaan dengan

¹⁶ Andi Chairul Achsan, ‘Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Pusat Pelayanan Kota (Studi Kasus Kecamatan Palu Timur, Kota Palu)’, *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 2.1 (1970), 83

berbentuk sistem, sehingga dapat berperan optimal dari sisi ekologi, sosial dan ekonomi

Menghadapi permasalahan tersebut, wacana mengenai konsep pembangunan Kota yang mulai memberikan perhatian pada factor ekologi, selain pada faktor ekonomi dan sosial, semakin berkembang. Salah satunya adalah konsep “*eco-city (ecological cities)*”. Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan ini merupakan bentuk representasi strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh karakter kawasan perkotaan .Berdasarkan konsep ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan mengembalikan ruang terbuka hijau ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem, sehingga dapat berperan optimal dari sisi ekologi, sosial dan ekonomi.¹⁷

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan polar ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan Pusat-Pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan

¹⁷ Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal, and Agus R. Soeriaatmadja, ‘Kebutuhan Terbuka Kota, Kawasan Padat, Studi Kasus Wilayah Tegallega, Bandung’, *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 281.1 (2012), 27–38 .

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,¹⁸

Menghadapi permasalahan ruang terbuka hijau, wacana mengenai konsep pembangunan Kota yang mulai memberikan perhatian pada faktor ekologi, selain pada faktor ekonomi dan sosial, semakin berkembang. Salah satunya adalah konsep “eco-city (ecological cities)”. Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan ini merupakan bentuk representasi strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh karakter kawasan perkotaan. Berdasarkan konsep ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan mengembalikan ruang terbuka hijau ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem, sehingga dapat berperan optimal dari sisi ekologi, sosial dan ekonomi.

F. Pembentukan Ruang Terbuka Hijau.

Pembentukan sistem ruang terbuka hijau Kota merupakan respon terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau suatu wilayah perkotaan, yang meliputi kebutuhan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut. Dari aspek ekologis, ruang terbuka hijau Kota merupakan bagian dari keseluruhan sistem ekologi

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 1 ,Tentang Penataan Ruang.

wilayah perkotaan, sedangkan dari aspek sosial dan ekonomi merupakan bagian dari struktur tata ruang tempat manusia beraktivitas.

Selain itu, penataan ruang terbuka hijau Kota juga merupakan bagian strategi perencanaan Kota untuk membatasi pembangunan serta mengatasi dampak ekologis berbagai aktivitas manusia terkait gangguan proses alam pada lingkungan perkotaan. Di antara strategi tersebut adalah ruang terbuka hijau sebagai area resapan, ruang terbuka hijau sebagai pereduksi polusi, serta ruang terbuka hijau sebagai penurun temperatur udara.¹⁹

G. Peranan Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau khususnya RTH yang publik yang di wilayah perkotaan sangatlah penting. Apabila ruang terbuka hijau tidak tersedia disuatu perkotaan maka bencana ekonomi semakin tinggi. Perkembangan dan pertumbuhan Kota/ perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai.

Pelaksanaan kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan harus mengacu kepada dasar hukum yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau

¹⁹ Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal, and Agus R. Soeriaatmadja, 'Kebutuhan Terbuka Kota, Kawasan Padat, Studi Kasus Wilayah Tegallega, Bandung', *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 281.1 (2012), 27–38 .

Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah propinsi dan kabupaten/Kota. RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.

Ruang terbuka hijau publik dapat dimanfaatkan secara maksimal agar tercipta kawasan perkotaan yang ideal. Khususnya untuk masyarakat di wilayah perkotaan dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka hijau publik sebagai salah satu media untuk rekreatif, edukatif atau sosial. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Penyelenggaraan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, ditujukan untuk tiga hal, yaitu : 1) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, 2) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kehidupan masyarakat, dan 3) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.²⁰

²⁰ Achmad Mukafi, 'Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Kudus', 2013.



Daftar Pustaka

- ACHSAN, A. C. (1970). Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Pusat Pelayanan Kota (Studi Kasus Kecamatan Palu Timur, Kota Palu). *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 2(1), 83.
- A.charito gemantara <https://gemantara.com/sejarah-kota-metro-lampung/>, (diakses pada 18 september 2019 pukul 03.00)
- Bahri, S., & Ali, S. A. (2012). Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, 1(1), 10–22.
- Chairul Anwar. “Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer Formula Dan Penerapan Dalam Pembelajaran”, Yogyakarta: Ireisod. 2017. Hal 311
- Chairul Anwar. “Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis”. Yogyakarta: SUKA-Press, 2014. Hal 36-37
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Ekamedia Arkanleema, 2009)
- Hidayat, K., Rosana, & SU, rahma kurnia. (2016). analisis ruang terbuka hijau publik di kabupaten pringsewu tahun 2014. 2014.
- Jeluddindaud, prinsip pembangunan wilayah (regional planning) sebagai suatu pedekatan dalam menyusun rencana tatar uang, makalah seminar penataan ruang, tahun 1996
- Luas Lahan menurut penggunaan lahannya dan Kecamatan di Kota Metro (online), <http://bappeda.metrokota.go.id/> (05 mei 2020)
- Merligon. (2017). *Inventarisasi dan Arahkan Prioritas Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Metro, Provinsi Lampung MERLIGON*
- Mukafi, A. (2013). *Tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau publik di kota kudas*.
- Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro (RTRW) Tahun 2011-2031
- Purnomohadi Ning, Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota. Direktorat jenderal penataan ruang, 2006

- Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A. R. (2012). Kebutuhan Terbuka Kota, Kawasan Padat, Studi Kasus Wilayah Tegallega, Bandung. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 281(1), 27–38.
- Sabdey, A., Soedarsono, & Niam, M. F. (2017). Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Studi Kasus: Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau. *Inovasi Dalam Pengembangan*, 135–150.
- Samsudi. (2010). Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta. *Journal of Rural Development*, 1(1), 11–19.
- Santoso, B., & Hidayah, R. (2012). Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman. *Inersia – Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 8 (1), 1–14
- Sejarah pendirian kota Metro, https://id.wikipedia.org/wiki/kota_metro. diakses 22 september pukul 20.00
- Suciyani, W. O. (2018). Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Kampus Di Politeknik Negeri Bandung. *Jurnal Planologi*, 15(1), 17.
- Hasan, 1963 dikutip oleh Sumarmi. Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Malang. Malang: Aditya Media Publishing. 2012
- Suria Ningsih, SH, M. H., Zaidar, SH, M. H., & Siregar, M. Y. A. H. (2014). Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Pemerintah Kota Medan). *Cell*, 3(4), 1–15.
- Susilowati, I., & -, N. (2013). Konsep Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Permukiman Kepadatan Tinggi. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(4), 429.
- Tika, P. Metode Penelitian Geografi. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2005
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang